

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah keamanan yang pada awalnya bermula dan berfokus pada keamanan Negara, mengalami pergeseran dari perspektif tradisional yang terbatas pada perang dan damai menuju perspektif non-tradisional yang lebih mengedepankan keamanan manusia. Pergeseran isu pasca perang dingin yang pada awalnya fokus terhadap keamanan Negara berubah menjadi keamanan manusia dikarenakan sebuah reaksi terhadap masalah – masalah dunia yang dihadapi saat ini. Seperti perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, dan terorisme. Oleh karena itu, keamanan tidak lagi berfokus hanya dengan hubungan antar Negara tetapi juga pada keamanan untuk masyarakat (Dalby, 2013:103).

Kejahatan internasional seperti terorisme menjadi isu peningkatan cukup tajam dan berkembang menjadi isu keamanan internasional. Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan ke dalam lima dimensi, yaitu politik, militer, ekonomi, sosial dan lingkungan. Dan tiap – tiap dimensi keamanan tersebut memiliki unit keamanan nilai, dan karakteristik serta ancaman yang berbeda (Buzan, 1991: 2-3).

Konsep keamanan internasional sudah mengalami pergeseran, dilihat dari *"the origin of threats"* pada masa perang dingin, berbagai ancaman selalu

dianggap datang dari pihak luar, kini ancaman dapat berasal dari domestik dan global, dan biasanya ancaman yang berasal dari dalam negeri berkaitan dengan etnis, budaya, agama. Bila dilihat dari “*The Nature of Threats*”, konsep keamanan tradisional melihat ancaman selalu bersifat militer dan arena itu pendekatan yang digunakan juga bersifat militeristik. Sedangkan menurut konsep keamanan non tradisional, bahwa dalam perkembangan nasional dan internasional, sebagaimana disebut diatas telah mengubah sifat ancaman menjadi lebih rumit dan kompleks, dengan demikian persoalan keamanan menjadi jauh lebih komprehensif dikarenakan menyangkut berbagai aspek lain seperti ekonomi, social budaya, lingkungan hidup, bahkan isu-isu lain seperti demokratisasi dan HAM (Perwita dan Yani, 2006: 123-125).

Mengangkat kasus yang berkaitan dengan individu tentu saja akan berkaitan dengan dunia internasional. Setiap manusia berhak menjalani hidupnya secara aman, nyaman, baik dalam konteks lokal Negara dan juga termasuk dalam pola hubungan Internasional. Keamanan manusia (*Human Security*) kini menjadi salah satu pandangan untuk melihat kewajiban sebuah Negara dalam mewujudkan hak-hak warga negaranya. Keamanan manusia (*Human Security*) dewasa ini mulai menjadi simbol utama bagi keamanan Negara, yang artinya untuk menjaga keamanan Negara saat ini tidak hanya fokus pada kemampuan militer yang menjaga batas wilayah sebuah Negara dari gangguan Negara lain.

Isu terorisme mulai menjelma sebagai isu global pasca serangan yang terjadi di Amerika Serikat 11 september 2001 pemboman gedung World Trade Center di Amerika Serikat. Setelah kejadian tersebut Amerika Serikat yang dipimpin

presiden George W. Bush salah satu dari banyak Negara yang merasa terancam mendeklarasikan kebijakan “*Global War on Terrorism*” (GWOT) (Williams, 2008: 171) atau yang lebih dikenal dengan *Counter Terrorism*. *Counter Terrorism* adalah upaya kerjasama yang ditujukan untuk melawan taktik, dan memiliki jangka waktu yang panjang dalam melawan terorisme dan segala bentuk terorisme internasional yang telah menjadi sorotan dunia (Williams, 2008: 376).

Serangan itu menjadikan AS harus dapat menerima kenyataan pahit dan menjadikan tidak ada lagi Negara di dunia yang terbebas dari ancaman kekerasan politik. Serangan tersebut membuat guncangan hebat dan juga menimbulkan rasa takut bagi warga AS dan membuat mereka berpikir mengapa terorisme sangat membenci AS. Serangan tersebut diyakini dilakukan oleh sekelompok terorisme yang bernama Al-Qaeda dan dipimpin oleh Osama Bin Laden dan dianggap sebagai kelompok yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

Dalam NSS, Amerika Serikat ingin memerangi terorisme baik dalam hal pertempuran maupun paham penyebaran sekuler dan demokrasi terhadap ideologi yang dianggap AS menyokong berkembangnya terorisme, yaitu : Mendukung pemerintahan moderat dan modern, khususnya di dunia Muslim, untuk memastikan bahwa kondisi dan ideologi yang mendukung terorisme tidak menemukan tempat untuk berkembang di negara manapun (NSS, 2002 : 6).

Kebijakan *War on Terrorism* yang siap dilaksanakan dalam negeri maupun luar negeri dan melalui operasi bertahap meliputi, penggunaan dalam kekuatan militer dengan finansial, investigasi, Homeland Security, serta aksi kemanusiaan (Hook, 2014: 345).

Homeland Security adalah strategi yang dibuat untuk melindungi warga AS, selain menangkal dan melawan dari serangan teroris, juga dengan mempererat hubungan negara-negara bagian AS untuk bersama-sama melindungi warga Negara AS. Karena dalam menjalankan keamanan nasional tentunya diperlukan sokongan dari semua pihak, maupun dari rakyat, negara bagian, pemerintahan, organisasi dan juga rekan bisnis (Hook, 2014: 345).

Kemudian AS membuat langkah-langkah untuk melakukan balas dendam terhadap mereka yang dianggap bertanggung jawab dalam insiden 9/11. Pemerintah AS memblokir situs-situs yang berkaitan dengan kelompok teroris-teroris. Lalu AS juga mengajak Negara – Negara di dunia bersama – sama untuk memerangi terorisme global (NSS, 2002: 6).

Pada tahun 2009 Barack Obama terpilih menjadi presiden AS yang ke- 44 dan menggantikan George W bush. Barack Obama mengenalkan kebijakan luar negeri nya terhadap terorisme berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Hal tersebut dilihat dari pidato yang disampaikan Barack Obama di depan Chicago Council on Global Affairs pada 23 April 2007. Pidato tersebut Barack Obama menjelaskan bahwa salah satu komponen kebijakan luar negeri Amerika adalah perbaikan dan rekonstruksi sistem aliansi dan kemitraan global dalam menghadapi tantangan dan ancaman.

Setelah terpilihnya Barack Obama menjadi Presiden AS, Obama menunjuk Hillary Clinton sebagai Menteri Luar Negeri nya. Clinton mengatakan bahwa kebijakan luar negeri AS akan lebih banyak mengedepankan diplomasi. Seperti halnya AS akan membuka kembali hubungan dengan Negara-negara islam yang sempat memanas. AS masa pemerintahan sebelum Obama adalah salah satu Negara yang kurang menjalin hubungan baik dengan Negara – Negara islam seperti Libya, Iran, Pakistan juga Suriah. Pada masa pemerintahan George Bush Amerika memandang Negara muslim umumnya sebagai sarang nya terorisme.

Perubahan kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Obama sangat signifikan. Kebijakan luar negeri AS yang awalnya sangat dominan di bawah pimpinan Bush, perlahan berubah menjadi lebih mengedepankan *Soft Diplomacy* dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya demi menghapus citra buruk di mata internasional (Ardiansyah, 2014 : 5).

Sebagai negara *Super Power*, setiap kebijakan yang diambil pemerintahan Amerika Serikat akan berdampak langsung secara global, termasuk negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti negara-negara di kawasan Timur Tengah seperti Suriah. Sejak tragedi 9/11, perhatian AS terhadap kawasan Timur Tengah yang dianggap sebagai sarang terorisme oleh George W. Bush dan kawasan yang tadinya dianggap aman bagi kepentingan AS, mulai diwaspadai karena munculnya jaringan terorisme internasional yang dikhawatirkan dapat mengancam kepentingan AS di kawasan Timur Tengah khususnya di Suriah.

Suriah dewasa ini merupakan sebuah Negara yang menjadi sorotan dunia internasional, mengingat konflik panjang yang sudah berlangsung lama di Negara tersebut, konflik yang lama dipastikan akan merusak komponen yang ada di Negara tersebut. Demonstrasi yang terjadi di Daara pada Tanggal 23 Maret 2011 mengawali konflik internal yang terjadi antara pendukung Bashar al Assad dan kelompok oposisi. Konflik internal tersebut dikarenakan gerakan masyarakat yang menginginkan turunnya presiden Bashar al Assad. Situasi konflik yang terjadi berawal dari mahasiswa yang melakukan demonstrasi untuk meminta membebaskan tahanan politik, saat demonstrasi tentara Suriah menanggapi situasi tersebut dengan penembakan para demonstiran secara brutal. Bashar al Assad menolak untuk memenuhi permintaan para demonstiran dengan menolak reformasi. Penembakan terhadap para demonstiran semakin meluas sampai pada Tanggal 25-26 Mei 2011 dan terjadi pembantaian di daerah Houla yang menewaskan 100 orang (<https://www.britannica.com/event/Syrian-Civil-War> diakses pada 20 maret 2019).

Upaya yang telah dilakukan kelompok oposisi untuk menurunkan Bashar Al Assad dari kursi kepresidenan menjadi konflik antara pemerintah dan kelompok oposisi Suriah. Konflik dalam negeri Suriah telah menjadi konflik terpanjang yang terjadi di Negara-negara Arab yang terkena dampak Arab Spring, aktor yang menjadi peran penting di konflik Suriah terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, Presiden Bashar al Assad dan para pendukungnya Kedua, kelompok oposisi yang bertujuan menurunkan rezim Bashar Al Assad dan melakukan reformasi. Ketiga, kelompok terorisme yang bertujuan mendirikan

khilafah di Suriah dan membentuk *Islamic State of Iraq and Sham* (ISIS) dan Jabhat Al Nusra. Konflik Suriah menjadi konflik terpanjang dan terburuk *Arab Spring* (Wardoyo, 2014: 181).

Pada awalnya demokratisasi dan gerakan reformasi telah berubah menjadi perang antara *non state actor* melawan aktor negara. NSA umumnya mengklaim sedang berupaya melakukan perang suci (jihad) dan menyatakan diri ingin mendirikan sistem khilafah di Suriah. Perubahan gerakan massa yang awalnya demokratisasi berubah menjadi ambisi untuk mendirikan khilafah di mulai ketika kelompok Jabhat Al Nusra mendeklarasikan kelompoknya dan sejak itu pula bermunculan kelompok-kelompok jihad yang lain (Yulianti & Sumadinata, 2018: 4).

Pada tahun 2012 muncul kelompok Jabhat Al-Nusra yang merupakan kelompok jihadis yang mempunyai tujuan berbeda dari oposisi ataupun pemerintah. Jabhat Al-Nusra adalah salah satu kelompok jihadis yang mempunyai peran penting di konflik suriah dan kelompok ini terus mendapat dukungan dari masyarakat serta kelompok pemberontak di Suriah (Kamrullah, 2017: 80).

Pada akhir 2013, Al Nusra memisahkan diri dari IS/Al Qaida Irak setelah Al Baghdadi mendeklarasikan ISIS (Islamic State in Iraq and Syria). Al-Julani menolak berjanji setia (bai'at) kepada Al Baghdadi yang mengangkat dirinya sebagai khalifah (<https://southfront.org/hayat-tahrir-al-sham-history-capabilities-role-in-syrian-war/> diakses pada 15 mei 2019). Sebelumnya, pada 2012 tepatnya pada 11 Desember pemerintah AS menyatakan bahwa Jabhat Al

Nusra adalah nama lain dari Al Qaeda Irak dan memasukkannya dalam daftar organisasi teroris internasional (<https://southfront.org/hayat-tahrir-al-sham-history-capabilities-role-in-syrian-war/> diakses pada 15 mei 2019).

Pada 2013 munculnya kelompok teroris baru *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) sebagai kelompok bagian pecahan dari Al – Qaeda yang terbentuk pada tahun 2006 di Irak lalu setelah kematian pemimpinnya Al – Zaraqawi diakibatkan serangan AS di Irak pada masa pemerintahan George Bush. ISI (*islamic state of Iraq*) merekrut pecahan dari Al Qaeda di Suriah di bawah pimpinan Abu Bakar al Baghdadi, kelompok gabungan ini mendeklarasikan nama *Islamic State of Iraq and Syria*. ISIS menjadi pasukan yang memerangi pemerintah di Suriah, pasukan ini telah mencapai keberhasilan dengan menduduki kota Suriah Raqqa - ibukota provinsi pertama yang jatuh di bawah kendali pemberontak (<http://www.bbc.com/news/world-middleeast-24179084> diakses pada 20 maret 2019).

Dengan hal tersebut AS dengan kebijakan *war on terrorism* mulai melakukan berbagai tindakan untuk mencegah kelompok ekstrimis di Suriah. Di bawah kepemimpinan Obama yang lebih mengedepankan diplomasi dan mendekati Negara – Negara Arab dengan tujuan memerangi terorisme.

Pengalaman di konflik Libya memperkuat tekad Obama untuk menghindari keterlibatan AS dalam perang saudara Suriah, yang dimulai pada Maret 2011 dengan masif demonstrasi melawan Presiden Bashar al-Assad. Setelah Assad berusaha untuk menekan demonstrasi dengan keras, milisi oposisi terbentuk dan konflik itu segera berkembang menjadi perang saudara penuh. Tetapi

pemberontakan juga memiliki komponen sektarian dan internasional. Ini mengadu Sunni Suriah mayoritas terhadap minoritas Syiah yang berkuasa di Assad. Assad menerima dukungan militer dari Iran Syiah dan Hizbullah Libanon, sementara lawan-lawannya, dengan pengecualian pemberontak ISIS, menerima banyak bantuan dari Arab Saudi dan negara-negara Teluk Persia yang dikelola Sunni lainnya (Powaski, 2019: 167)

Sementara Obama bertekad untuk tetap keluar dari konflik Suriah, setelah itu menyaksikan kekejaman pemerintah yang berulang terhadap warga sipil Suriah, pada bulan Agustus 2011 dia mengatakan bahwa "*waktunya telah tiba bagi Presiden Assad untuk mundur*". Tetapi Assad tidak berniat menyerahkan kekuasaan, dan dengan pasukan AS menarik diri dari Irak dan Afghanistan, Obama tidak akan mengirim Pasukan ke Suriah untuk menggulingkan Assad. Namun, pada Mei 2012, presiden Obama mulai memikirkan mengirimkan pasukan ke Suriah karena melihat sejumlah besar senjata kimia (Powaski, 2019: 168).

Pada 21 Agustus 2013, terjadi pelanggaran terhadap warga sipil ketika ratusan warga sipil Suriah tewas akibat serangan senjata kimia oleh pasukan pemerintah. Tetapi pada menit akhir, Obama membatalkan rencana serangan rudal AS terhadap instalasi militer Suriah. Perubahan pikirannya sebagian didorong oleh suara Inggris. *House of Commons* menolak partisipasi Inggris dalam aksi militer melawan Suriah. Obama menolak untuk bertindak tanpa Inggris. Selain itu, survei opini publik mengungkapkan bahwa sebagian besar orang Amerika juga menentang aksi militer terhadap Suriah; hanya 28% dari

mereka yang disurvei yang mendukung tanggapan militer AS. Akibatnya, Obama memutuskan untuk merujuk masalah ini kepada Kongres, yang dia sadari tidak akan mendukung aksi militer AS terhadap Assad (Starr-Deelen, 2018: 28).

Pada pidato Presiden Obama di sidang majelis umum PBB pada tanggal 24 september 2014, Obama menyatakan bahwa AS akan membuat koalisi untuk menghancurkan jaringan terorisme, dan AS tidak berjalan sendiri. AS akan menggunakan kekuatan militernya untuk menyerang melalui udara guna memukul mundur terorisme, AS akan melatih pasukan oposisi untuk melawan teroris di darat, dan juga akan memutus aliran dana, dan menghentikan arus keluar masuknya terorisme di kawasan tersebut, serta telah bergabungnya lebih dari 40 negara dalam koalisi ini (<https://id.usembassy.gov/id/pidato-presiden-obama-di-sidang-majelis-umum-pbb/> diakses pada 8 April 2019).

AS membentuk kelompok oposisi *Free Syrian Army (FSA)*, *Syrian National Council (SNC)* atau yang sekarang telah berubah menjadi *Syrian National Council for Opposition and Revolutionary Forces (SNCORF)* yang dibentuk oleh Amerika di Doha, Qatar dengan tujuan untuk melawan terorisme di darat dan didanai oleh AS. Koalisi ini terdiri dari 60 anggota yang berasal dari 22 mantan anggota dari SNC perwakilan dari masing-masing kota besar Suriah, dan sejumlah tokoh pemberontak Suriah yang berada di luar negeri. Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya telah mengakui koalisi tersebut sebagai wakil masyarakat Suriah (Sulaeman, 2013: 95).

Kehadiran pasukan Amerika Serikat di perbatasan Tanf, Homs, selatan Suriah. Keberadaan pasukan Amerika tersebut dikabarkan untuk melatih kelompok pemberontak Free Syrian Army (FSA). Menurut laporan media oposisi tersebut pasukan Amerika melatih pasukan FSA. Tujuan pasukan Amerika adalah untuk mempersiapkan FSA melawan ISIS dan kelompok terorisme lainnya, yaitu kelompok pemberontak lainnya yang ada di Suriah (<https://www.indopress.id/article/internasional/pasukan-amerika-melatih-kelompok-oposisi-di-suriah> diakses pada 8 april 2019).

Pada September tahun 2014 *Global Coalition* melawan kelompok teroris dibentuk, Koalisi Global berkomitmen untuk mengatasi dan akhirnya mengalahkan terorisme. Ke-79 anggota Koalisi berkomitmen untuk menangani terorisme di semua lini, untuk membongkar jaringannya dan melawan ambisi globalnya. Di luar kampanye militer di Irak dan Suriah, koalisi global berkomitmen untuk mencegah pembiayaan dan infrastruktur ekonomi kelompok teroris; mencegah arus pejuang teroris asing melintasi perbatasan; mendukung stabilisasi dan pemulihan layanan publik yang penting ke daerah-daerah yang dibebaskan dari teroris dan melawan propaganda kelompok teroris (<https://www.state.gov/s/seci/c72810.htm> diakses pada tanggal 9 april 2019).

Pada September 2016 Amerika Serikat dan Rusia mencapai kesepakatan penting secara besar-besaran. Setelah berbulan-bulan negosiasi yang tampaknya gagal, mereka menyetujui rencana bersama untuk mengakhiri perang di Suriah.

Usulan itu, yang diumumkan oleh Sekretaris Negara John Kerry dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, sangat ambisius. Gagasan dasarnya adalah bagi AS dan Rusia untuk membuat pemberontak Suriah dan pemerintah Suriah, masing-masing, untuk berhenti saling bertarung sementara, sehingga AS dan Rusia dapat mulai bersama-sama menyerang kelompok terorisme. Tujuan utamanya adalah gencatan senjata dan anti ekstrimis sebagai landasan untuk perjanjian perdamaian permanen yang dinegosiasikan (<https://www.vox.com/2016/9/10/12868556/us-russia-syria-agreement> explained diakses pada 8 april 2019).

Dalam upaya mendukung penelitian ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai kebijakan AS terhadap terorisme dan konflik Suriah. Penelitian pertama adalah skripsi dari Irfan Nurhakim yang berjudul *Kerjasama Amerika Serikat – Filipina dalam Perang Melawan Terorisme di Filipina (2010-2014)* dari Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Pada Skripsi tersebut menjelaskan program kerjasama Amerika Serikat dan Filipina dalam memberantas terorisme di Filipina dan diharapkan dapat menurunkan kapabilitas kelompok ASG sehingga kelompok tersebut tidak dapat melancarkan tindakan terorisme dengan skala besar. Keberhasilan tersebut dapat tercapai dikarenakan adanya latihan militer yang diberikan oleh Amerika Serikat ke AFP dan dilakukannya proyek bantuan kemanusiaan untuk memerangi kondisi yang dalam menimbulkan ancaman terorisme.

Perbedaan penelitian Irfan Nurhakim dengan penelitian ini adalah terdapat di Negara yang menjadi objek AS, penelitian Irfan Nurhakim memilih Filipina sebagai objek penelitian sedangkan penelitian ini memilih Suriah sebagai objek penelitian.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah skripsi dari Rica Hadam Purwanti yang berjudul *Media Massa sebagai Alat Propaganda Amerika Serikat Masalah Terorisme di Asia Tenggara* dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Komputer Indonesia. Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa AS melakukan propogandanya dalam masalah terorisme di Asia Tenggara setelah serangan WTC pada tahun 2001 dan setelah itu AS mengeluarkan National Security Strategy (NSS) pada tahun 2002 dimana AS mendeklarasikan Global War on Terrorism atau Counter Terrorism melalui media massa AS dengan cara yang persuasif kepada pemerintah dan masyarakat Asia Tenggara. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa AS memberikan informasi terkait GWOT melalui media massa seperti Voice of America (VOA), Cable News Network (CNN) serta times magazine online. Penelitian Rica menjelaskan bahwa AS menggunakan media massa dalam kampanye dengan tujuan kepentingan untuk melancarkan soft power dan faktor pendorong dalam penerapan *War on Terrorism* di kawasan Asia Tenggara.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah dalam segi pembahasan dimana penelitian Rica membahas tentang media massa sebagai

alat propaganda sedangkan penelitian ini membahas tentang *war on terrorism* di konflik Suriah.

Penelitian berikutnya adalah skripsi dari Jana Milia yang berjudul *Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat terhadap Kelompok Terorisme Al-Qaeda pada Masa Pemerintahan Barack Obama* dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa AS mengubah fokus kebijakan luar negerinya. Pada saat pemerintahan George Bush, AS banyak mendapat kecaman dikarenakan kebijakan kontroversial yang terjadi saat AS menginvasi Irak, lalu pada 2009 George Bush digantikan oleh Barrack Obama yang dikenal sangat berbeda dengan pemimpin sebelumnya terbukti dari bagaimana Bush memandang Negara-negara muslim sebagai tempat sarangnya teroris dan Obama lebih mendekatkan diri dengan Negara-negara muslim dengan tujuan memerangi terorisme.

Perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah dari segi pembahasan yang mana penelitian dari Jana Milia lebih membahas bagaimana kebijakan *war on terrorism* terhadap kelompok Al Qaeda, sedangkan penelitian ini membahas tentang kebijakan *War on Terrorism* terhadap ISIS di konflik Suriah.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini akan membahas tentang

“Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Memerangi Terorisme di Suriah Pada Masa Pemerintahan Barrack Obama”

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional, yaitu antara lain:

1. Politik Luar Negeri

Mata kuliah ini membantu dalam memahami pelaksanaan kebijakan AS dalam memerangi terorisme di Suriah.

2. Studi Keamanan Internasional

Mata kuliah ini membantu peneliti dalam menjelaskan isu isu terorisme dan elemen umum dari terorisme yaitu perang inkonvensional yang menjadi masalah banyak Negara termasuk Suriah dengan banyaknya aksi terorisme yang terjadi akibat pemberontakan.

3. Hubungan Internasional di Amerika

Mata kuliah ini membantu peneliti dalam menjelaskan kebijakan AS dalam *War on Terrorism* setelah terjadinya serangan 9/11 dan dampaknya bagi dunia terutama kawasan Timur Tengah yang rawan konflik, khususnya Suriah yang terdapat kelompok terorisme.

4. Hubungan Internasional di Timur Tengah

Mata kuliah ini membantu peneliti dalam memahami konflik yang terjadi di Suriah dan penyebab konflik di Suriah serta memahami bagaimana munculnya para kelompok terorisme.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

”Bagaimana Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam Memerangi Terorisme di Suriah Pada Masa Pemerintahan Barrack Obama?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa saja yang menjadi kepentingan Amerika Serikat di Suriah?
2. Upaya apa saja yang telah dilakukan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di Suriah pada masa pemerintahan Barack Obama?
3. Apa saja kendala Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di Suriah?
4. Bagaimana perang melawan terorisme di Suriah melalui kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan diberikan batasan masalah agar permasalahan yang diteliti dapat lebih terarah. Peneliti akan membatasi waktu penelitian yang dimulai dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Pada tahun 2011 awal mulanya terjadi konflik di Suriah dan pada tahun 2016 masa pemerintahan Barack Obama berakhir.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk meneliti kebijakan apa saja yang dikeluarkan Obama untuk memerangi terorisme di Suriah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kepentingan yang ingin dicapai Amerika Serikat di Suriah.
2. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di Suriah.
3. Untuk mengetahui kendala Amerika Serikat dalam memerangi terorisme di Suriah.
3. Untuk mengetahui perang melawan terorisme melalui kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan peneliti serta memberikan atau menambah pembedaharaan pustaka, serta dapat memberikan sedikit sumbangan bagi Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional, dan memahami tentang

Kebijakan Amerika Serikat dalam Memerangi Terorisme di Suriah Pada Masa Pemerintahan Barack Obama.

1.4.2 Kegunaan Praktisi

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi bagi para penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang tertarik dengan masalah-masalah kebijakan Amerika terhadap terorisme.
2. Untuk sumbangan pengetahuan khususnya bagi penstudi Ilmu Hubungan Internasional dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dalam memerangi Terorisme di Suriah Pada Masa Pemerintahan Barack Obama.